



Strategi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Jalan di Wilayah Kabupaten Grobogan

Tegar Satriani¹, Anisa Lana Safira², Dewi Purwitasari³

^{1,2,3} Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan

Abstract. *The road network has a positive role in economic growth in the short term creating jobs in the construction sector and in the medium and long term it will support increasing the efficiency and productivity of related sectors. This infrastructure is the answer to the needs of Grobogan Regency to encourage economic growth, by helping to overcome poverty, improve the quality of life, support the growth of economic centers and increase the mobility of goods and services and reduce the cost of investment activities. The road network system must be able to support the activity system in the form of spatial planning, increasing accessibility that can spread economic growth evenly. Purwodadi, which has been designated as part of the National Strategic Area (KSN) based on Presidential Regulation (PERPRES) Number 60 of 2022 concerning the Spatial Plan for the National Strategic Area of the Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, and Purwodadi Urban Areas, must receive sufficient support for its development. In addition, Grobogan Regency is also a regency that has the highest movement attraction in Central Java. National Transportation Origin Destination Prediction (ATTN) Data 2023 shows that the movement pull (people/year) regionally in Central Java Province, Grobogan is the district with the sixth highest pull after Cilacap and Banyumas. To support the spatial structure/activity system, it is absolutely necessary to have an agreed road network system planning document that can guarantee integration between development centers, an accurate database, and consistent policies. In other words, activity system planning must be supported by a Road/Transportation Network System based on the appropriate road network function and hierarchy. Thus, the preparation and development of the road/transportation network system in Grobogan Regency is expected to support the regional development vision as outlined in the Regional Development Program (Propeda) and Strategic Plan (Renstra).*

Keywords: *Development, Roads, Policies.*

Abstrak. Jaringan jalan memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dan jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait. Infrastruktur tersebut menjadi jawaban dari kebutuhan Kabupaten Grobogan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta merendahkan biaya aktivitas investasi. Sistem jaringan jalan harus dapat mendukung sistem kegiatan berupa tata ruang, meningkatkan aksesibilitas yang dapat menyebarkan pertumbuhan ekonomi secara merata. Purwodadi yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi, harus mendapatkan dukungan yang cukup untuk pengembangannya. Selain itu, Kabupaten Grobogan juga merupakan kabupaten yang memiliki daya tarik pergerakan termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Data Prediksi Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN) 2023 menunjukkan bahwa tarikan pergerakan (orang/tahun) secara regional di Provinsi Jawa Tengah, Grobogan merupakan kabupaten dengan tarikan tertinggi ke enam setelah Cilacap dan Banyumas.

Untuk mendukung struktur ruang/sistem kegiatan itu, mutlak diperlukan adanya suatu dokumen perencanaan sistem jaringan jalan yang disepakati dan dapat menjamin integrasi antar pusat pengembangan, basis data yang akurat, serta kebijakan yang konsisten. Dengan kata lain, perencanaan sistem kegiatan harus didukung oleh Sistem Jaringan Jalan/Transportasi yang didasarkan atas fungsi dan hirarki jaringan jalan yang sesuai. Dengan demikian, penyusunan dan pengembangan sistem jaringan jalan/transportasi di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat mendukung visi pembangunan daerah yang dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Rencana Strategis (Renstra).

Kata kunci: Pembangunan, Jalan, Kebijakan.

LATAR BELAKANG

Luas wilayah Kabupaten Grobogan berdasarkan surat dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK perihal Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, tercatat seluas 2.023,85 Km dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Potensi luas wilayah ini mendorong juga pertumbuhan ekonominya yang cenderung fluktuatif antara 4-6 persen selama periode 2013-2017. Pertumbuhan tertinggi tercapai pada tahun 2015 sebesar 5,96 %, sementara pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 4,07 %.

Untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, Kabupaten Grobogan telah membuat suatu kerangka struktur tata ruang yang baik. Adapun untuk rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan di sekitarnya dalam wilayah kabupaten. Selain itu juga sebagai sistem peletakan jaringan prasarana wilayah serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan atau perkotaan yang ada. Kabupaten Grobogan telah menentukan sistem pusat pelayanan yang direncanakan melalui rencana struktur ruang dalam Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2031. Pengembangan sistem pusat pelayanan terbagi menjadi dua, yakni rencana pengembangan sistem perkotaan, dan rencana pengembangan sistem perdesaan.

Untuk mendukung struktur ruang/sistem kegiatan itu, mutlak diperlukan adanya suatu dokumen perencanaan sistem jaringan jalan yang disepakati dan dapat menjamin integrasi antar pusat pengembangan, basis data yang akurat, serta kebijakan yang konsisten. Dengan kata lain, perencanaan sistem kegiatan harus didukung oleh Sistem Jaringan Jalan/Transportasi yang didasarkan atas fungsi dan hirarki jaringan jalan yang sesuai.

Dengan demikian, penyusunan dan pengembangan sistem jaringan jalan/transportasi di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat mendukung visi pembangunan daerah yang dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Rencana Strategis (Renstra).

KAJIAN TEORITIS

Karakteristik Ekonomi Wilayah Dan Perkembangannya

Nilai PDRB Kabupaten Grobogan atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 27,26 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 0,02 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 27,28 triliun rupiah. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha (dampak pandemi covid 19) dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 19,69 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 19,38 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Grobogan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar -1,59 persen. Perekonomian Kab. Grobogan untuk pertama kalinya sejak tahun 2010 mengalami kontraksi sebesar -1,59 persen.

Struktur Ekonomi Kabupaten Grobogan

Besarnya Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama tiga tahun terakhir (2018-2020) struktur perekonomian Kabupaten Grobogan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Konstruksi dan Jasa Pendidikan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 28,64 persen (angka ini menurun dari 31,85 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 19,91 persen (naik dari 19,23 persen di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 13,70 persen (naik dari 11,87 persen di tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,34 persen (naik dari 5,09 persen di tahun 2018) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,30 persen.

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri pengolahan mengalami kenaikan peranan. Industri pengolahan terus mengalami kenaikan peranan sejak tahun 2018. Pada masa pandemi covid-19 ini lapangan usaha konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta jasa

pendidikan mengalami penurunan peranan. Adapun lapangan usaha selain lima lapangan usaha tersebut, masing-masing memiliki peran kurang dari 5 persen.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Setelah Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2019-2020 yang secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Grobogan. Ekonomi Kabupaten Grobogan tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -1,59, . Kontraksi ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan negatif tersebut dipengaruhi oleh sembilan (9) kategori lapangan usaha mengalami kontraksi dan hanya delapan kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Tabel 6 mengkonfirmasi kondisi tersebut. Namun di Tahun 2021 telah kembali mengalami kenaikan 3,78 persen.

Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu sebesar 28,62 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Work From Home (bekerja dari rumah), Study From Home (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Konstruksi sebesar -8,23 persen serta Jasa Perusahaan yang terkontraksi sebesar -6,27 persen. Namun demikian di tahun 2021 telah menunjukkan kondisi yang positif akibat pemulihan ekonomi yang diusahakan.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang tahun 2020 dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 16,78 persen, seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran online serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual. Delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 16,78 persen, Pengadaan listrik dan Gas 5,65 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,59 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 4,31 persen,

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,28 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,92 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,52 persen dan Industri Pengolahan sebesar 0,39 persen.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif berdampak secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2020, berkontraksi sehingga mengalami Negative Growth sebesar -1,59%. Sembilan lapangan usaha tersebut adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar -28,62 persen, Konstruksi sebesar -8,23 persen, Jasa Perusahaan sebesar -6,27 persen, Jasa lainnya sebesar -3,74 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -3,26 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -1,60 persen, Jasa Pendidikan sebesar -1,34 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,89 persen, dan Sektor Real Estate sebesar -0,12.

PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Grobogan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 16,02 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 19,80 juta rupiah, tetapi pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 19,70 juta rupiah.

METODE PENELITIAN

Data yang diperlukan pada studi ini adalah data sistem kegiatan berupa: Rencana Tata Ruang (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota); Tataran Transportasi Nasional dan Tataran Transportasi Wilayah; data demografi serta data jaringan jalan eksisting. Data dalam bentuk tabular dan spasial untuk kemudahan analisis.

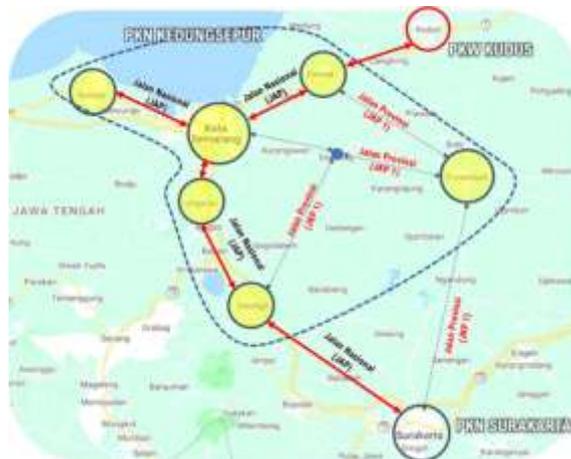
Analisis

Analisis yang dilakukan dalam studi ini adalah analisis sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan. Analisis dilakukan secara spasial dengan bantuan Sistem Informasi Geografis dalam plotting sistem kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Grobogan Terhadap Sistem Jaringan Jalan Primer

Jaringan primer sebagai prasarana konektivitas antar pusat kegiatan utama di KSN Kedungsepur saat ini cukup bervariasi. Terdiri dari fungsi Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer – I (JKP – 1), dengan status jalan nasional dan provinsi (Lihat Gambar 18). Namun demikian bahwa distribusi hirarki jalan belum sesuai dengan sistem kegiatan Purwodadi yang telah ditetapkan termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur, secara hirarki hanya terkoneksi dengan KSN lainnya dengan Jalan Kolektor Primer 1 dengan status Jalan Provinsi.



Gambar Konektivitas Eksisting KSN Kedungsepur

Pada sistem primer ini, struktur hirarki terbaik adalah menaikkan fungsi jalan yang menghubungkan KSN Purwodadi yang merupakan bagian dari Kedungsepur dengan fungsi Jalan Arteri Primer (JAP). Koneksi utama adalah ke Demak, dan Sragen atau Surakarta.

Dengan menaikkan fungsi jalan yang menghubungkan Purwodadi dengan KSN Kedungsepur terdekat dengan volume lalu lintas yang tinggi akan tercapai keseimbangan jaringan dan sistem kegiatan. Kondisi ini akan memicu pertumbuhan wilayah yang baik dengan peningkatan aksesibilitas.



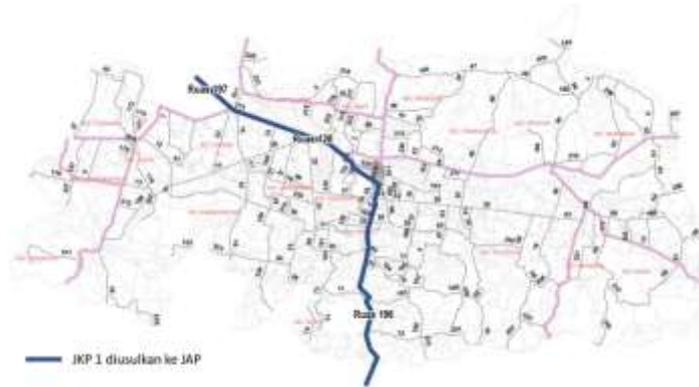
Gambar Usulan Hirarki di KSN Kedungsepur

Hal ini sebagian juga telah tercantum dalam rencana pengembangan pada Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Jawa Tengah 2021-2029, yaitu:

1. Rencana pengembangan Jalan Kolektor Primer (JKP):
 - Jati-Purwodadi, Purwodadi-Godong, Surakarta-Purwodadi-Pati,
 - Gubug-Kedungjati-Salatiga;
 - Semarang-Purwodadi-Blora dan Pengembangan ruas jalan Cepu-Blora-Rembang;
2. Rencana peningkatan kewenangan jalan provinsi yang menjadi jalan nasional:
 - Ruas jalan Semarang-Godong;
 - Ruas jalan Godong-Purwodadi; dan
 - Ruas jalan Purwodadi-Blora.

Berdasarkan pertimbangan kesimbangan sistem jaringan primer, kondisi pergerakan perjalanan, dan Tatrawil, maka dapat disimpulkan terkait dengan peningkatan status jalan sebagai berikut:

Jalan Kolektor Primer 1 (JKP 1) pada Ruas 128 (Godong – Purwodadi), 197 (Demak – Godong), dan 196 (Purwodadi – Geyer/Bts Kab Sragen) yang merupakan jalan dengan status Jalan Provinsi, sebaiknya ditingkatkan menjadi ruas jalan dengan fungsi Jalan Arteri Primer (JAP) dengan status Jalan Nasional.



Gambar Usulan Peningkatan Fungsi JKP 1 ke JAP

2. Analisis Sistem Jaringan Sekunder (Konektivitas, Kekosongan Jaringan dan Indeks Aksesibilitas)

A. Konektivitas ibu kota kecamatan

Saat ini, konektivitas ibu kota kecamatan di seluruh Kabupaten Grobogan telah terhubung pada Jalan Kolektor Primer 1 (JKP 1), kecuali Kecamatan Pulokulon yang terkoneksi dengan Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4). Jadi secara umum, semua ibukota kecamatan yang secara hirarki dapat terhubung dengan Jalan Lokal Primer (JLP) menurut Permen 3/Prt/M2012 (Pedoman Penetapan Fungsi dan Status) telah terhubung dengan hirarki jalan yang lebih tinggi.



Gambar Hirarki Jalan dengan Ibu Kota Kecamatan

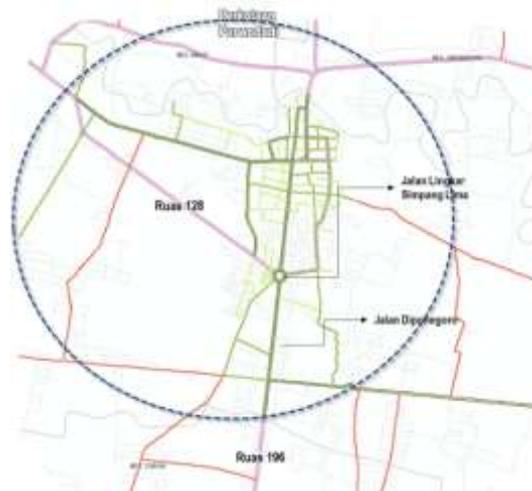
B. Konektivitas Pusat Kegiatan Wilayah

Konektivitas terhadap pusat pertumbuhan wilayah yang ada di Kabupaten Grobogan juga telah dipenuhi dengan struktur hirarki yang memadai. Semua kawasan strategis di Kabupaten Grobogan, telah terhubung secara jaringan primer dengan hirarki yang sesuai. Termasuk dalam masing-masing sistem sekunder juga telah terkoneksi dengan baik.



Gambar Konektivitas dan Pusat Pertumbuhan Lokal

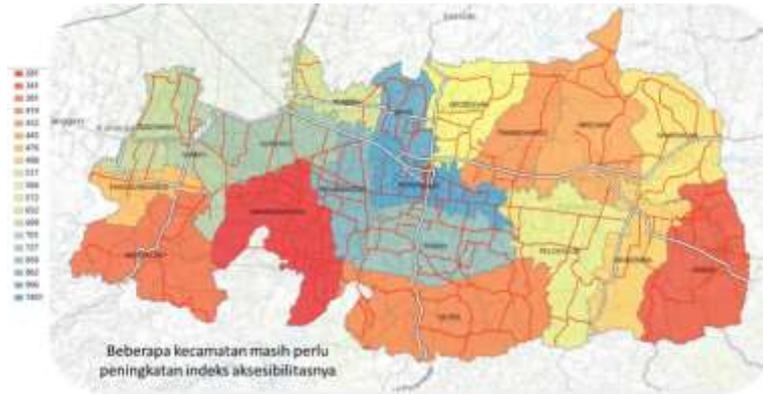
Usulan penyesuaian hirarki hanya sistem sekunder di Perkotaan Purwodadi, yaitu Jalan Lingkar Simpang Lima (128) dan Jalan Diponegoro (31). Karena kedua jalan ini merupakan penghubung jalan provinsi 128 dan 196, maka perlu dinaikan kelas jalannya agar dapat menerima beban lalu lintas dengan standar jalan provinsi (Gambar 23).



Gambar Posisi Jalan Diponegoro dan Jalan Lingkar Simpang Lima

C. Kebutuhan Pengembangan Jaringan Jalan

Dipetakan juga hasil analisis indeks aksesibilitas sebagai ukuran kemudahan suatu wilayah untuk dapat dijangkau atau dicapai. Hasil pemetaan indeks aksesibilitas menunjukkan beberapa wilayah masih perlu mendapat perhatian dengan angka indeks kurang dari 500, artinya masih perlu perluasan jaringan atau penambahan jaringan jalan (Gambar 24), seperti Kecamatan Kedungjati, Karangrayung, Geyer, Kradenan, Gabus, Tanggunharjo, Tawangharjo dan Wirosari.



Gambar Hasil analisis indeks aksesibilitas

KESIMPULAN DAN SARAN

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang memiliki daya tarik pergerakan termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Data Prediksi Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN) 2023 menunjukkan bahwa tarikan pergerakan (orang/tahun) secara regional di Provinsi Jawa Tengah, Grobogan merupakan kabupaten dengan tarikan tertinggi ke enam setelah Cilacap dan Banyumas. Tarikan ini mencapai 28.009.570 orang/tahun.

Purwodadi yang telah ditetapkan termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur, secara hirarki hanya terkoneksi dengan KSN lainnya dengan Jalan Kolektor Primer 1 dengan status Jalan Provinsi. Sistem jaringan jalan primer sebagai prasarana konektivitas antar pusat kegiatan utama di KSN Kedungsepur saat ini cukup bervariasi. Terdiri dari fungsi Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer – I (JKP – 1), dengan status jalan nasional dan provinsi (Lihat Gambar 18). Namun demikian bahwa distribusi hirarki jalan belum sesuai dengan sistem kegiatan.

Konektivitas ibu kota kecamatan di seluruh Kabupaten Grobogan telah terhubung pada Jalan Kolektor Primer 1 (JKP 1), kecuali Kecamatan Pulokulon yang terkoneksi dengan Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4). Jadi secara umum, semua ibukota kecamatan yang secara hirarki dapat terhubung dengan Jalan Lokal Primer (JLP) menurut Permen 3/Prt/M2012 (Pedoman Penetapan Fungsi dan Status) telah terhubung dengan hirarki jalan yang lebih tinggi.

Konektivitas terhadap pusat pertumbuhan wilayah yang ada di Kabupaten Grobogan juga telah dipenuhi dengan struktur hirarki yang memadai. Semua kawasan strategis di Kabupaten Grobogan, telah terhubung secara jaringan primer dengan hirarki yang sesuai. Termasuk dalam masing-masing sistem sekunder juga telah terkoneksi dengan baik.

Hasil pemetaan indeks aksesibilitas menunjukkan beberapa wilayah masih perlu mendapat perhatian dengan angka indeks kurang dari 500, artinya masih perlu perluasan jaringan atau penambahan jaringan jalan.

Rekomendasi

Pada sistem primer ini, struktur hirarki terbaik adalah menaikkan fungsi jalan yang menghubungkan KSN Purwodadi yang merupakan bagian dari Kedungsepur dengan fungsi Jalan Arteri Primer (JAP). Koneksi utama adalah ke Demak, dan Sragen atau Surakarta.

Hasil pemetaan indeks aksesibilitas menunjukkan beberapa wilayah masih perlu mendapat perhatian dengan angka indeks kurang dari 500, artinya masih perlu perluasan jaringan atau penambahan jaringan jalan seperti Kecamatan Kedungjati, Karangrayung, Geyer, Kradenan, Gabus, Tanggunharjo, Tawangharjo dan Wirosari.

Usulan penyesuaian hirarki hanya sistem sekunder di Perkotaan Purwodadi, yaitu Jalan Lingkar Simpang Lima (128) dan Jalan Diponegoro (31). Karena kedua jalan ini merupakan penghubung jalan provinsi 128 dan 196, maka perlu dinaikan kelas jalannya agar dapat menerima beban lalu lintas dengan standar jalan provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. (n.d.). Surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK perihal Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah. Kementerian Dalam Negeri.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. (2021). Produk domestik regional bruto Kabupaten Grobogan tahun 2019-2021. Grobogan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan. (2017). Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Grobogan tahun 2011 - 2031 (Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 7 Tahun 2012). Grobogan: Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (n.d.). Pedoman umum penyusunan program pembangunan daerah (Propeda) dan rencana strategis (Renstra). Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. (2020). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan tahun 2018-2020. Grobogan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.